

Membuka Jalan Menuju Pendidikan Modern di Aceh: Potret Sejarah Perjuangan Guru Pribumi dalam Surat Kabar *Oetoesan Goeroe* (1926-1930)

Pioneering modern education in Aceh: The historical portrait of native teachers' struggle in *Oetoesan Goeroe* Newspaper (1926-1930)

Abstrak

Pembangunan pendidikan modern di Aceh pada masa kolonial memiliki motif kuat untuk mengubah mentalitas masyarakatnya. Tujuannya adalah pemerintah Hindia-Belanda ingin mengubah sistem pendidikan tradisional menjadi sistem pendidikan modern untuk mengubah pola pikir masyarakat Aceh agar mendukung kolonialisme. Artikel ini berupaya merekonstruksi sejarah pembangunan pendidikan modern di Aceh pada masa kolonial dan perjuangan para guru pribumi melalui analisis terhadap surat kabar *Oetoesan Goeroe*. Surat kabar tersebut adalah organ resmi dari PGGG (Perkoempoelan Goeroe-goeroe Gouvernement Atjeh) yang memuat berita-berita tentang pembangunan pendidikan Aceh dalam kurun 1926–1930. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk dan pendekatan Historiographical CDA. Hasil riset menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda awalnya memiliki ekspektasi terlalu besar untuk mewujudkan pasifikasi Aceh melalui sektor pendidikan namun kenyataannya justru tidak begitu serius memberikan solusi atas berbagai hambatan. Guru-guru pribumi yang awalnya mengemban misi mulia untuk membangun pendidikan di Aceh justru terjebak dalam situasi serba sulit. Mayoritas guru-guru pribumi kala itu berasal dari luar Aceh. Mereka harus mengabdikan diri di desa-desa dengan kesejahteraan yang mengkhawatirkan, fasilitas yang tidak memadai, pemerintah kolonial yang kurang responsif dan solutif, resistensi penduduk yang anti-Belanda, hingga kesulitan dalam penyesuaian bahasa lokal.

Kata Kunci: Sejarah pendidikan; pendidikan modern; guru pribumi; Aceh; *Oetoesan Goeroe*; Historiographical CDA.

Abstract

The development of modern education in Aceh during the colonial period was driven by a strong motive to transform the mindset of its society. The objective was for the Dutch East Indies government to convert the traditional education system into a modern one, shaping the Acehnese mindset to support colonialism. This article seeks to reconstruct the history of modern education development in colonial Aceh and the struggles of native teachers through an analysis of the *Oetoesan Goeroe* newspaper. This newspaper served as the official organ of PGGG (Perkoempoelan Goeroe-goeroe Gouvernement Atjeh) and contained news about Aceh's educational development from 1926 to 1930. The research methodology employed a historical method with Critical Discourse Analysis (CDA) by Teun A. van Dijk and the Historiographical CDA approach. The research findings reveal that the early colonial Dutch government held overly optimistic expectations regarding the pacification of Aceh through the education sector, yet they did not provide effective solutions to the various challenges faced. Native teachers, initially on a noble mission to build education in Aceh, found themselves trapped in extremely difficult circumstances. Most of these teachers came from outside Aceh and had to serve in villages with alarming poverty, inadequate facilities, an unresponsive and unsupportive colonial government, resistance from anti-Dutch inhabitants, and difficulties in adapting to the local language.

Keywords: Educational history; modern education; native teachers; Aceh; *Oetoesan Goeroe*; Historiographical CDA.

PENDAHULUAN

Ketika Islam menjadi bagian tak terpisahkan dalam masyarakat Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam era Sultan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi), sektor pendidikan tradisional juga berkembang dengan ditandai munculnya lembaga *meunasah*¹ yang mendidik masyarakat Aceh dalam ilmu agama, bahasa, hukum, seni budaya, militer, dan olahraga (Hasballah, 2020). *Meunasah* adalah bagian penting dari struktur pemerintahan Kesultanan Aceh dan merupakan pusat kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai pusat komunikasi, *meunasah* memiliki peran utama dalam menjalankan program-program pemerintah pusat. Misalnya, jika sultan memerintahkan peningkatan produksi pangan, pelaksanaan program tersebut akan dimulai dan disosialisasikan di kampung-kampung atau tempat di mana *meunasah* berada. Fungsi *meunasah* sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan pendidikan. *Meunasah* adalah tempat di mana berbagai kegiatan masyarakat desa berpusat, dan sebagai lembaga tradisional, *meunasah* menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh selama berabad-abad (Hasballah, 2020).

Meunasah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dan sebagai penopang sumber daya manusia di Kesultanan Aceh abad ke-17. Eksistensi Kesultanan Aceh dan corak keislamannya yang mengakar menjadikannya kesultanan yang disegani di kawasan Selat Malaka hingga memasuki abad ke-19. Memasuki abad ke-19, terjadi perubahan politik karena perkembangan teknologi di Eropa yang menekan kedaulatan Kesultanan Aceh (Perang Aceh, 1873-1912 Masehi). Belanda telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan berdaulat di Nusantara ke dalam wilayah koloni Hindia-Belanda. Aceh, hingga awal abad ke-20 belum takluk seluruhnya akibat mobilisasi gerilyawan oleh para ulama, meskipun Belanda telah menjalankan pemerintahan sipil dan militer di bawah perwira militer berpengalaman era Perang Aceh. Kala itu, Gotfried Coenraad Ernst van Daalen menjabat sebagai Gubernur Sipil dan Militer (1905-1908), serta Joannes Benedictus van Heutsz menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1904-1909). Untuk menuntaskan misi penaklukan (pasifikasi), Aceh mesti dipengaruhi sistem-sistem yang berasal dari Eropa, khususnya di dalam sistem pendidikan melalui kebijakan Politik Etis (1901-1942) (Alfian, 1987, p. 204). Pemerintah Hindia Belanda mulai merancang sistem pendidikan untuk anak-anak pribumi dengan mengadopsi sistem pendidikan Eropa.

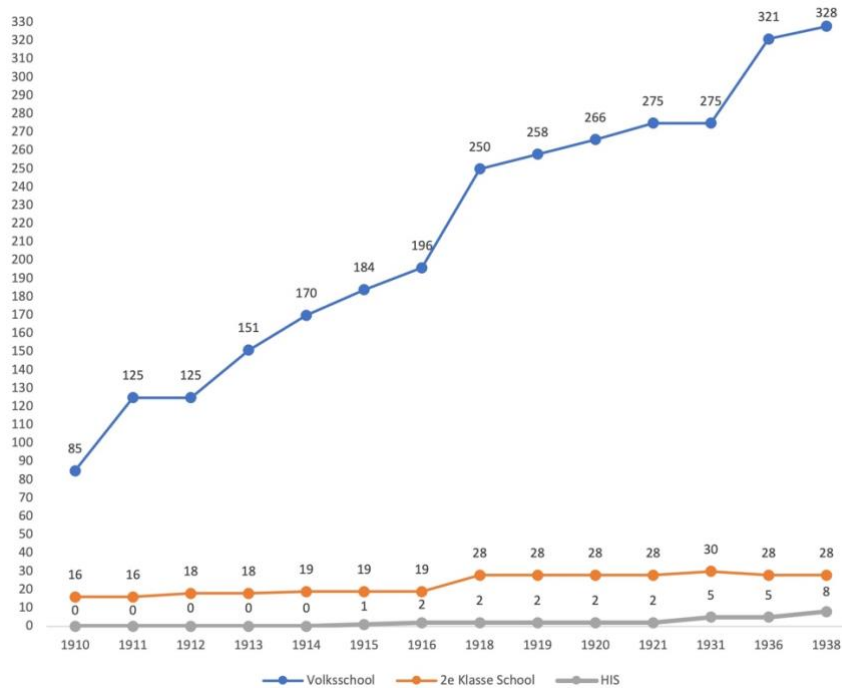
Sekolah pertama didirikan pada era Van Daalen adalah sekolah dasar umum 3 tahun (Volksschool) pada 30 Desember 1907 di Aceh Besar, distrik Ulee Lheue dengan

¹ *Meunasah* merupakan sebuah lembaga pendidikan dasar Islam resmi di masa lalu di Aceh. Pengajar dan pembimbing di *meunasah* disebut sebagai *teungku meunasah*. Kurikulum yang diajarkan di *meunasah* melibatkan metode membaca Alquran yang dimulai dengan belajar huruf-huruf hijaiyah (huruf Arab), membaca Juz Amma, menghafal surat-surat pendek, dan kemudian lanjut dengan membaca Alquran utuh sambil memperdalam pelajaran *tajwid*. Selain itu, materi lain mencakup pengenalan dasar-dasar agama, seperti rukun Islam, rukun iman, atribut-atribut Allah, rukun shalat, praktik shalat, puasa, dan zakat (Hasballah, 2020). Jika siswa telah menyelesaikan pendidikan mereka di *meunasah*, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu *rangkang* dan *dayah*. Pendidikan Islam dasar ini diberikan kepada anak-anak ketika mereka berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Biasanya, ayah akan membawa anak laki-laki ke *meunasah* untuk belajar membaca Alquran dan dasar-dasar pendidikan agama Islam dari seorang *tengku meunasah* (guru laki-laki), sementara anak perempuan akan dikirim oleh ibunya ke rumah *tengku inong* (guru perempuan) masing-masing. Diharapkan bahwa anak-anak akan berhasil menguasai membaca Alquran setelah empat tahun belajar di *meunasah*. Pada saat ini, anak laki-laki akan menjalani sunat sebagai tanda masuk ke dalam status sosial yang baru, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti upacara-upacara tradisional atau keagamaan yang mewakili peran mereka dalam masyarakat (Hurgronje, 1906a, pp. 61–64).

jumlah murid 38 orang. Volksschool sebenarnya meniru pola pengembangan sekolah di Jawa dan dirancang untuk mengajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu beraksara Romawi (B. Ismail, 1995, p. 62; Kreemer, 1922, p. 159; Reid, 1979, p. 21). Selanjutnya pada 4 Januari 1908 dibangun lagi sekolah umum dengan jumlah murid 35 orang di Lam Lagang (B. Ismail, 1995, p. 62). Uniknyanya, sekolah tersebut tetap disebut sebagai *sikola mukim* (*moekimschool*) oleh penduduk, karena didirikan dalam sebuah *mukim* (semacam sub-distrik). Meski sekolah sudah didirikan, kenyataannya keadaan belum berubah sesuai harapan Belanda. Masyarakat Aceh belum juga bisa ditaklukkan dan tetap menolak kedaulatan Belanda. Padahal jumlah sekolah kian meningkat secara signifikan, terutama pada era Gubernur Sipil dan Militer Aceh yang dijuluki Sang Pasifikator, Henri Nicolas Alfred Swart (1908-1918) (Kreemer, 1922, p. 159). Kesulitan Belanda untuk menaklukkan Aceh ternyata secara tidak langsung dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pendidikan Quranik tradisional yang telah eksis sejak masa Kesultanan Iskandar Muda. *Meunasah*, *dayah*, dan *rangkring* selama era kolonial malah melahirkan bibit-bibit pemberontakan terhadap semua sistem yang berasal dari Eropa. Sistem dan kurikulumnya diupayakan mampu menyeimbangkan antara ilmu umum dengan agama untuk menetralkan pengaruh westernisasi dalam masyarakat Aceh (Reid, 1979, p. 21). Gubernur Swart dalam *Memorie van Overgave* dirinya mengenang bahwa "Dalam pandangan Belanda, pendidikan Quranik tradisional yang telah diberikan oleh ulama kepada pemuda Aceh hanya mengajarkan mereka kebencian dan penghinaan terhadap kafir" (Reid, 1979, p. 21; Swart, 1918).

Berbeda dengan di Jawa, jenis sekolah dasar yang dibangun oleh pemerintah kolonial di Aceh lebih sedikit. Artinya, tidak seperti di Jawa, tidak semua jenis pendidikan tersedia di Aceh. Selain Volksschool, jenis sekolah dasar lainnya yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk rakyat pribumi adalah 2e (Tweede) Klasse School dan Inlandsche School (Sekolah Bumiputra) atau lebih populer dengan nama Sekolah Melayu. Keduanya hanya terdapat di kota-kota saja (Syarwan, 2002, p. 128). Jumlah sekolah rakyat sampai dekade pertama abad ke-20 di Aceh mencapai 85 unit dengan 1.200 murid (Ardhillah, 2022, pp. 30–31; Departement van Onderwijs en Eeredienst, 1911). Memasuki dekade kedua khususnya tahun 1919, jumlah sekolah tersebut telah meningkat menjadi 258 unit dengan 15.476 murid, termasuk 20 sekolah khusus untuk perempuan dengan 1.161 murid dan meningkat menjadi 266 unit pada tahun 1920 (see **Graphic 1**) (Departement van Onderwijs en Eeredienst, 1921; Kreemer, 1922, p. 159).

Graphic 1. Growth in the number of elementary schools during the second decade of the 20th century in Aceh



Source: Data processed based on several source (Aken, 1936, p. 149; Departement van Onderwijs en Eeredienst, 1911, 1915, 1916, 1920, 1921; Syarwan, 2002, pp. 143–155)

Untuk tetap melanjutkan pasifikasi melalui pendidikan sekuler, Hindia-Belanda kala itu membutuhkan 'perbaikan' konsep pendidikan dengan membatasi guru-guru dari Eropa dan mulai memproduksi guru pribumi melalui Kweekschool (Suwignyo, 2012, p. 83). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor guru-guru dari Eropa yang membutuhkan biaya sangat mahal (diperparah oleh situasi Perang Dunia I) dan kehadiran mereka terlalu mencolok sebagai target kebencian masyarakat Aceh. Untuk mewujudkannya, Hoogere Kweekschool (HKS) didirikan pada 1914 dan pada 1927 Kweekschool bertransformasi menjadi Hollands-Inlandsche Kweekschool (HIK) atau Sekolah Guru Belanda untuk Pribumi (Suwignyo, 2012, p. 10). Setahun sebelumnya berdiri pula Persatoean Goeroe Hindia Belanda (PGHB) yang bercita-cita bahwa "orang pribumi ingin Hollandsch-Inlandsche School (HIS) diperluas bukan karena pertimbangan budaya atau idealisme lainnya, tetapi karena HIS adalah jalan langsung [bagi mereka] untuk naik ke puncak tangga sosial." (Suwignyo, 2012, p. 93). Solidaritas di antara guru-guru pribumi mulai tumbuh dan menguat melalui asosiasi-asosiasi, baik lingkup nasional maupun lokal.

Pada tahun 1915, guru-guru pribumi di Aceh Besar telah menginisiasi pembentukan perserikatan guru yang dinamai Perkoempoelan Goeroe-goeroe Gouvernement Atjeh (PGGA). PGGA bisa dikatakan muncul sebagai implikasi dari reformasi pendidikan di Hindia-Belanda pada tahun 1907, tentunya akan strategi yang bagus untuk meredam perlawanan melalui pendidikan. Terbukanya kesempatan di sektor pendidikan membuat arah pembangunan pendidikan di Aceh cukup prospektif, meskipun terbelang terlambat ketimbang yang telah berlangsung di daerah lain, terutama Sumatera Barat dan Jawa. PGGA sendiri adalah bukti bahwa jumlah guru-guru pribumi telah bertambah secara signifikan, yaitu 600 orang pada tahun 1930 (Jongejans, 1939, p.

254). Memang, sudah sejak awal sektor pendidikan memiliki kendala ketersediaan guru-guru yang akan bertugas di wilayah yang baru saja 'takluk'. Sehingga solusinya adalah mendatangkan guru-guru pribumi dari luar Aceh yang tidak terbiasa dengan bahasa Aceh lokal. Sementara itu, penduduk pedesaan hanya mengerti bahasa Aceh dan Arab, tidak terbiasa dengan bahasa Melayu, apalagi bahasa Belanda. PGGGA adalah wadah yang tepat dalam membicarakan persoalan belajar mengajar serta berbagi pengetahuan. Tidak hanya itu saja, PGGGA juga menjadi wadah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru yang digaji oleh pemerintah kolonial. Suara dan aspirasi para guru di organ tersebut dipublikasikan dalam surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang terbit pada periode 1926 sampai 1930.

Selama ini kajian pendidikan di Aceh masih sekitar riset-riset terkait sejarah institusi dan perkembangan siswa, sedangkan riset-riset terkait sejarah perjuangan atau nasib para guru masih menjadi celah dalam khazanah sejarah pendidikan. Beberapa literatur yang cukup lawas ada proyek-proyek riset Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Ibrahim, 1991) dan *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh* (Ahmad, 1984). Keduanya hanya melaporkan gambaran umum dan kronologis sistem pendidikan sejak masa Kesultanan Aceh hingga kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa literatur yang tergolong baru seperti kajian Abdul Hadi (Hadi, 2014) melihat dinamika pendidikan dari prakolonial hingga pasca kolonial di Aceh yang dibahas secara umum tanpa mengupas substansi yang tajam. Tentunya kajian tersebut terasa normatif. Kajian tersebut hampir sama dengan Stephen Roche (Roche, 2012) yang melihat dinamika sistem pendidikan di Aceh dari tradisional hingga modern, di mana pembahasannya mengupas hal-hal yang umum. Madhan Anis (Anis, 2015) mencoba menghadirkan kajian lebih spesifik peranan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) terhadap madrasah, tetapi terbatas pada fokus nilai-nilai keislaman saja di dalam tubuh madrasah. Sebuah tesis master oleh T. Syarwan berjudul *Pendidikan Barat untuk Penduduk Bumiputra di Aceh, 1900-1942* (Syarwan, 2002) sangat relevan dan mendalam membahas bagaimana pendidikan untuk rakyat pribumi dibangun. Ia menyoroti pentingnya pendidikan dalam perubahan sosial, politik, dan identitas di Aceh. Pendidikan tradisional dan Barat saling melengkapi dan membentuk keragaman pendidikan di Aceh. Konteks politik kolonial Belanda juga memainkan peran dalam pengembangan pendidikan di Aceh, dengan tujuan mempertahankan kekuasaan. Syarwan menggunakan pendekatan struktural fungsional untuk merekonstruksi peran kolonial Belanda dan elite dalam pembangunan pendidikan dan dampaknya bagi perubahan sosial di Aceh. Namun tidak sampai menyorot peranan guru-guru dan dinamikanya dalam membangun pendidikan untuk rakyat pribumi.

Literatur lainnya lebih banyak berbicara sistem pendidikan secara sekilas dari tema besar untuk Aceh seperti yang dilakukan oleh Arndt Graf, dkk (Graf, Schröter, & Wieringa, 2020), Irwan Adaby (Adaby, 2017), dan Fatianda & Badrun (Fatianda & Badrun, 2022). Karya-karya tersebut pada dasarnya berbicara tentang politik, sejarah, dan budaya. Pendidikan ditempatkan sebagai dukungan dalam ketiga tema besar tersebut untuk melengkapi pembahasan. Di dalam kajian pendidikan secara umum, masih banyak sebenarnya yang berbicara tema-tema pendidikan yang terkait masa kolonial. Disertasi doktoral oleh Agus Suwignyo (Suwignyo, 2012) sangat komprehensif dan mendalam menggali sejarah pendidikan pribumi era kolonial, namun fokus pada

standardisasi Kweekschool atau sekolah guru. Demikian pula kajian sejarah evolusi Kweekschool hingga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) oleh Mochtar Buchori (Buchori, 2007). Gunawan & Een Suhaeni (Gunawan & Suhaeni, 2022) fokus pada dinamika pendidikan dalam berbagai tipe, seperti pendidikan untuk kalangan Eropa, Cina, dan Pribumi. Tetapi, fokus kajian tersebut tidak menyentuh sejarah perkembangan pendidikan di Aceh secara holistik dan mendalam yang menyorot peranan atau aktivisme pelaku pendidikan pada zamannya. Adapun kajian-kajian beberapa tahun terakhir tampak menunjukkan tren riset terkait sejarah lembaga pendidikan tradisional dan Islamis di Aceh, seperti *meunasah* (Hasballah, 2020; Mahmazar, Mulyadi, & Miswari, 2023), *dayah* (Basri, 2022; Nurainiah, 2021; Raya, 2021; Roche, 2012), dan tradisi pendidikan keislaman di Aceh (Inayatillah, 2023). Sementara sejarah pendidikan sekuler-modern dan nasib guru-guru pribumi belum dikaji.

Berdasarkan *literature review* di atas, terdapat gap yang memungkinkan bagi riset ini untuk mengisi celah tersebut. Secara lebih spesifik, riset ini menawarkan beberapa kebaruan yang belum pernah ditawarkan oleh riset-riset sebelumnya, yaitu: (1) Riset ini berupaya merekonstruksi sejarah pembangunan pendidikan sekuler-modern di Aceh dari perspektif guru pribumi dengan memanfaatkan surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang diterbitkan oleh asosiasi guru itu sendiri sebagai sumber primer. Surat kabar tersebut adalah organ resmi dari PGGA yang memuat berita-berita tentang pembangunan pendidikan Aceh dalam kurun 1926 – 1930; (2) Sekalipun menggunakan metode sejarah, namun data yang diperoleh dari konten informasi dan berita dalam surat kabar tersebut dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun Adrianus van Dijk. Melalui analisis terhadap surat kabar *Oetoesan Goeroe*, riset ini menawarkan kebaruan berupa hasil rekonstruksi sejarah pendidikan Aceh dari perspektif guru pribumi dengan mengelaborasi fakta-fakta yang lebih akurat dari karena berasal dari informasi internal PGGA serta didukung oleh literatur sejarah terkait pendidikan, sosial, politik, ekonomi yang menggambarkan situasi pendidikan di Aceh pada zaman itu.

Celah riset yang diisi dan *novelty* yang ditawarkan dalam riset ini berawal dari upaya menyibak masa lalu sektor pendidikan di Aceh pada masa kolonial yang tergolong terlambat berkembang dibandingkan daerah-daerah lain dan harapan para guru kala itu melalui pertanyaan kunci, yaitu: (1) bagaimana relasi antara pemerintah kolonial dan masyarakat Aceh kala itu sehingga mempengaruhi ketertinggalan pembangunan pendidikan modern?; (2) bagaimana tantangan pembangunan pendidikan modern kala itu yang merupakan bagian dari program pemerintah kolonial; (3) bagaimana guru-guru pribumi di Aceh memperjuangkan kesejahteraannya di tengah misinya memajukan pendidikan untuk bangsa pribumi?

METODE

Riset ini menggunakan metode sejarah yang dikenal dalam empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Riset ini telah dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai Agustus 2023. Lingkup temporal riset ini adalah periode 1926-1930 sesuai masa terbit surat kabar *Oetoesan Goeroe*. Walaupun situasi dan kondisi zaman tidak terlepas dari awal abad ke-20 secara umum. Lingkup spasial riset ini adalah bekas

wilayah administrasi Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden yang kini merupakan wilayah administrasi Propinsi Aceh, Republik Indonesia.

Tahap heuristik yang telah dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan sumber yang relevan sebagai data kesejarahan. Sumber primer pertama adalah surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang terbit dari tahun 1926 sampai 1930. Arsip digital *Oetoesan Goeroe* diunduh dari layanan koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (<https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/300332>). Sumber primer kedua adalah beberapa bundel arsip *Memorie van Overgave van het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden* dari H. N. A. Swart (30 Agustus 1918), O. M. Goedhart (30 Mei 1929), A. H. Philips (31 Mei 1932), dan A. Ph. van Aken (28 Mei 1936) yang diunduh dalam versi digital dari layanan arsip digital Nationaal Archief Kerajaan Belanda (<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39>). *Memorie van Overgave* (MvO) yang dimaksud merupakan dokumen otentik laporan serah terima jabatan para Gubernur Aceh dalam lingkup Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Sumber primer ketiga adalah beberapa jilid dari *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*, yang merupakan laporan resmi dari Departement van Onderwijs en Eeredienst. MvO dan *Algemeen verslag* tersebut dapat digunakan sebagai sumber primer karena menyediakan informasi yang aktual dan kredibel terutama laporan yang berkaitan dengan sejarah dan pendidikan di Aceh juga relevan dengan situasi zaman. Sumber sekunder yang digunakan terutama berasal dari buku-buku referensi atau monografi dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan dengan topik riset ini.

Tahap verifikasi yang telah dilakukan meliputi kegiatan kritik sumber dari aspek eksternal dan internal. Semua sumber primer dinyatakan lolos kritik eksternal dengan nilai otensitas dan kredibilitas yang tidak diragukan. Pada surat kabar *Oetoesan Guru*, kritik internal hanya dibutuhkan untuk menyeleksi berbagai jenis konten karena yang digunakan hanya konten berjenis reportase dan opini karena lebih aktual dengan kadar objektivitas dan subjektivitas yang lebihimbang. Selain itu, MvO dan *Algemeen verslag* dinyatakan lolos dalam kritik internal.

Tahap interpretasi telah dilakukan dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk membantu analisis dan sintesis khas disiplin sejarah yang lebih diakronik. Obyek yang dianalisis dan diinterpretasikan adalah konten dari surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang terbit dari 1926 sampai 1930. Subjek yang dianalisis adalah guru-guru pribumi dalam organisasi PGGA. Objek dan subjek riset ini dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun Adrianus van Dijk. Analisis Wacana Kritis model Van Dijk sering disebut sebagai pendekatan kognisi sosial karena menekankan peran faktor kognisi dalam pembentukan wacana. Kognisi menjadi faktor kunci dalam produksi wacana, melibatkan proses kognisi sosial. Van Dijk mengajukan pendapat bahwa dalam menganalisis wacana, penting untuk tidak hanya memeriksa teks itu sendiri, tetapi juga memahami bagaimana teks tersebut dihasilkan dan alasan di balik produksinya (Van Dijk, 2015, pp. 466–485). Dalam kognisi sosial, manusia memiliki pengetahuan generik dan abstrak tentang dunia yang dibagikan dengan anggota komunitas epistemik yang sama. Selain itu, sebagai anggota kelompok sosial tertentu, manusia juga dapat berbagi sikap, ideologi, dan pengalaman personal. Berbagai bentuk kognisi sosial ini membentuk model mental personal dan unik dari individu, yang bisa

mirip atau berbeda dengan anggota komunitas atau kelompok yang sama. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman ini memungkinkan kerjasama, interaksi, dan komunikasi antar manusia, yang pada akhirnya memungkinkan adanya diskusi dan dialog (Van Dijk, 2016, pp. 66–67). Dalam pendekatan kognisi sosial, wacana digambarkan ke dalam bentuk tiga dimensi struktur, yaitu teks sebagai pusat dimensi, sementara itu dimensi kedua terdapat kognisi sosial, dan dimensi terakhir adalah konteks (Van Dijk, 2011, pp. 1–35). Teks di sini adalah konten-konten dari surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang merupakan sumber primer. Kognisi sosial adalah mentalitas yang terkandung pada masyarakat di masa kolonial, khususnya situasi sosial yang terdapat di Aceh dalam mempengaruhi teks-teks yang terkandung dalam pemberitaan *Oetoesan Goeroe*. Sementara itu, konteks mengacu pada realitas sejarah yang didapat dari berbagai sumber primer lainnya ataupun sumber sekunder hasil dari berbagai karya yang fokus pada kajian seputar pendidikan pada awal abad ke-20 di Hindia-Belanda. Riset ini hanya fokus pada analisis tingkat makro terhadap dimensi struktur teks, dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti kekuatan, dominasi, dan ketidaksetaraan antara kelompok sosial alih-alih penggunaan bahasa, wacana, interaksi verbal, dan komunikasi termasuk dalam tingkat mikro (Van Dijk, 2015, p. 468).

Historiografi berfokus pada pembentukan wacana sejarah (Achugar, 2017, p. 299). Tahap historiografi telah dilakukan dengan menyusun temuan-temuan bermuatan fakta sejarah sesuai hasil analisis dan sintesis dalam penjelasan sejarah yang kritis meminjam pendekatan *Historiographical CDA* dari Mariana Achugar. Pendekatan *Historiographical CDA* telah mengeksplorasi representasi masa lalu sebagai konten dan praktik. Aspek ganda dari wacana tentang masa lalu ini melibatkan penyelidikan tentang bagaimana wacana-wacana ini diproduksi dan diterima, tetapi juga menjelajahi wacana-wacana yang berurusan dengan masa lalu yang kontroversial. Penjelajahan wacana tentang situasi yang memiliki dampak politik dan moral kontemporer telah memberikan lensa kritis terhadap pemahaman kita tentang makna dan penggunaan masa lalu (Achugar, 2017, p. 299). Tujuannya adalah untuk menjawab tiga pertanyaan kunci riset ini ke dalam tiga sub-pembahasan sebagai penjelasan sejarah yang lebih objektif, aktual, kritis, dan logis untuk merekonstruksi sejarah yang tidak bias terkait pembangunan pendidikan modern di Aceh pada masa kolonial dan perjuangan para guru pribumi melalui analisis terhadap surat kabar *Oetoesan Goeroe*.

PEMBAHASAN

Profil surat kabar *Oetoesan Goeroe*

Surat kabar *Oetoesan Goeroe* merupakan organ resmi dari Perserikatan Goeroe-Goeroe *Gouvernement Atjeh* (PGGA). Surat kabar ini didirikan oleh guru-guru Bumiputra yang berkedudukan di Koetaradja (kini: Banda Aceh). Biarpun berkedudukan di Koetaradja, namun surat kabar ini juga menjadi wadah dari semua anggota PGGA yang ada di wilayah Aceh dan sekitarnya. Tujuan didirikannya surat kabar ini adalah untuk menambah pengetahuan para guru dalam bidang pendidikan dan juga menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan nasib para guru agar lebih sejahtera, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya. Target pembaca surat kabar ini ialah semua kalangan. Bahasa utama yang dipilih ada bahasa Melayu lama dan dipengaruhi kosa kata sehari-hari dari bahasa

Belanda. Surat kabar ini terbit satu bulan sekali pada setiap tanggal 15. Harga langganannya, 1 gulden untuk 6 bulan, 1.80 gulden untuk satu tahun, dengan minimal harus berlangganan selama 6 bulan pertama. Sementara untuk biaya iklan sebesar, 1 barisnya dikenakan biaya 0.20 gulden dan minimal setiap iklan perdana dikenakan biaya 1.50 gulden. Tidak ditemukan alasan apa yang menyebabkan nasib surat kabar ini hanya berusia 5 tahun saja.

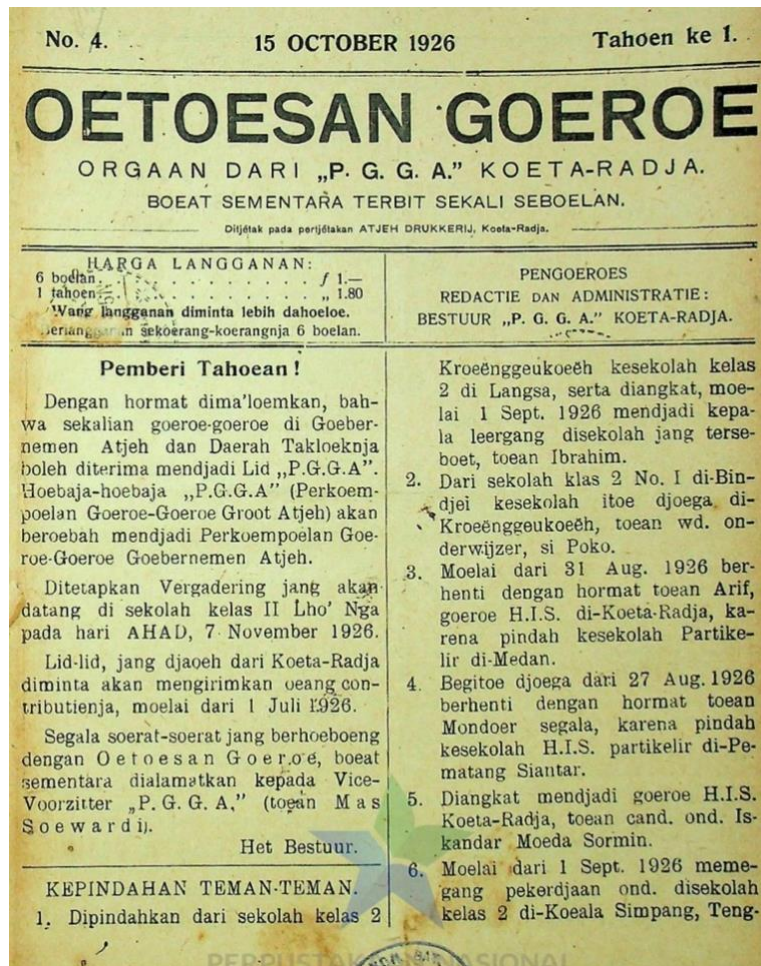


Figure 1. Front cover of *Oetoesan Goeroe* edition No. 4 (15 October 1926)
Source: <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/300332>

Table 1. Identity of *Oetoesan Goeroe* Newspaper

Nama Surat Kabar	Oetoesan-Goeroe
Lembaga Penerbit	Orgaan dari Perserikatan Goeroe-Goeroe Gouvernement Atjeh (PGGA) Koeta Radja
Kota Terbit	Koetaraja (Banda Aceh)
Penerbit	Atjeh Drukkerij
Tahun Terbit	Penerbitan awal Oktober 1926 – Penerbitan terakhir September 1930
Frekuensi Terbit	Satu bulan sekali
Versi Digital	Koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/300332
Kategori	Majalah & Surat Kabar Langka
Nomor Katalog	300332
Nomor Panggil	B: - 1221

Table 2. Number of digital collections of *Oetoesan Goeroe* in Khastara

1926	1927	1928	1929	1930
No. 4, 15 Oktober 1926	No. 1, 15 Januari 1927	No. 1, 15 Januari 1928	No. 1, 15 Januari 1929	No. 1, 15 Januari 1930
No. 5, 15 November 1926	No. 2, 15 Februari 1927	No. 2, 15 Februari 1928	No. 2, 15 Februari 1929	No. 2-3, 15 Maret 1930
No. 6, 15 Desember 1926	No. 3, 15 Maret 1927	No. 3, 15 Maret 1928	No. 3, 15 Maret 1929	No. 5, 15 Mei 1930
	No. 4, 15 April 1927	No. 4, 15 April 1928	No. 4, 15 April 1929	No. 6, 15 Juni 1930
	No. 5, 15 Mei 1927	No. 5, 15 Mei 1928	No. 5, 15 Mei 1929	No. 7, 15 Juli 1930
	No. 6, 15 Juni 1927	No. 6, 15 Juni 1928	No. 6, 15 Juni 1929	No. 8, 15 Agustus 1930
	No. 7, 15 Juli 1927	No. 7, 15 Juli 1928	No. 7, 15 Juli 1929	No. 9, 15 September 1930
	No. 8, 15 Agustus 1927	No. 8, 15 Agustus 1928	No. 8, 15 Agustus 1929	
	No. 9, 15 September 1927	No. 9, 15 September 1928	No. 9, 15 September 1929	
	No. 10, 15 Oktober 1927	No. 10, 15 Oktober 1928	No. 10, 15 Oktober 1929	
	No. 11, 15 November 1927	No. 11, 15 November 1928	No. 11, 15 November 1929	
	No. 12, 15 Desember 1927	No. 12, 15 Desember 1928	No. 12, 15 Desember 1929	

Oetoesan Goeroe hanya berusia lima tahun (1926-1930). Selama aktif terbit, surat kabar tersebut mengalami perkembangan yang fluktuatif. Modal usaha penerbitannya terutama berasal dari keuntungan dari pelanggan dan bantuan dari pemerintah kolonial. Eksistensi *Oetoesan Goeroe* sebagai oase bagi para guru yang tengah perjuangannya mendidik anak-anak pribumi di penjuru desa-desa. Namun sayangnya, situasi perekonomian semakin sulit ketika memasuki masa depresi ekonomi (great depression) pada akhir 1929 sampai 1930. Situasi ini secara umum mempengaruhi semua usaha penerbitan surat kabar di Hindia Belanda, tidak terkecuali *Oetoesan Goeroe*. Teridentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan PGGA menghentikan usaha penerbitan *Oetoesan Goeroe*, yaitu: (1) depresi ekonomi yang mempengaruhi menurunnya jumlah pelanggan dan daya bayar pelanggan sehingga mengakibatkan perputaran modal macet; (2) Redaksi *Oetoesan Goeroe* memiliki utang, solidaritas para guru yang menyokong pemasukan kas mulai melemah, terjadi defisit keuangan yang parah, dan membengkaknya biaya produksi sehingga menambah kerugian usaha; (3) Pemerintah kolonial yang juga mengalami defisit anggaran akibat depresi ekonomi terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dan pemangkasan pegawai negeri sebanyak 4%, termasuk guru yang menjadi bagiannya; (4) Pemerintah kolonial gagal menyalurkan subsidi secara merata untuk sekolah-sekolah pemerintah yang jumlahnya semakin bertambah (“Aneka Warta,” 1930; “Notulen,” 1929); (5) Sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah dan Taman siswa terutama di perkotaan lebih adaptif dan mampu bertahan dengan pengelolaan yang mandiri (Goedhart, 1929, p. 65; Philips, 1932, p. 30). Faktor-faktor di atas memperburuk kondisi internal organisasi PGGA yang akhirnya bubar dan usaha penerbitan *Oetoesan Goeroe* yang bangkrut.

Guru Pribumi dalam Kognisi Sosial

Klaim kolonialis pada umumnya menggarisbawahi bahwa perkembangan pendidikan modern di Hindia-Belanda bersumber dari Politik Etis atau semata-mata faktor pemenuhan kebutuhan pemerintah kolonial terhadap tenaga terdidik. Kebutuhan guru di Hindia-Belanda menjadi mendesak sejak dekade kedua abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh situasi global yang kurang kondusif sebelum dan setelah Perang Dunia I yang berdampak pada membengkaknya biaya untuk mendatangkan guru-guru dari Eropa sehingga Hindia Belanda harus mampu memproduksi guru di dalam negeri (Suwignyo, 2012, p. 10). Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan penguasaan secara kultural juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah kolonial mencoba strategi geopolitik dengan pendekatan baru '*Atjeh-politiek*' sesuai yang disarankan oleh C. Snouck Hurgronje yaitu dengan sikap lunak, menggantikan kekerasan dengan pendekatan damai dan kooperatif. Tujuannya adalah meredam kebencian, memperoleh simpati, dan membangun kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial, seiring dengan penerapan Politik Etis di Aceh pada abad ke-20 (M. G. Ismail, 1991). Perkembangan pendidikan di Aceh sendiri merupakan salah satu dari banyak misi Pasifikasi Aceh.

Awalnya, pendidikan Barat hanya diterima oleh sebagian *ulèëbalang*, belum oleh ulama dan rakyat. Sejak tahun 1901, banyak putra *ulèëbalang* dikirim ke sekolah terbaik di Koetaradja dan Bukittinggi. Organisasi Muhammadiyah dan Taman Siswa ikut mendorong percepatan pendidikan Bumiputra melalui sekolah swasta mereka. Pemerintah berusaha menggantikan pendidikan tradisional dengan sistem sekolah modern, sebagai bagian dari strategi Pasifikasi Aceh (Muhajir, 2018). Namun Belanda menghadapi hambatan dari perlawanan rakyat Aceh yang tidak kunjung padam walaupun Sultan Muhammad Daud Syah menyerah pada 1903. Rakyat yang kemudian dimobilisasi oleh ulama secara sporadis kerap mengganggu pemerintahan kolonial yang didirikan. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat Aceh terhadap orang Belanda *kaphee* (kafir) sudah diajarkan mendarah daging di *meunasah* atau *mukim*. Untuk itu, bagi Belanda mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya adalah prioritas untuk menetralsir (sekularisasi) sisa-sisa perlawanan rakyat. Sebagaimana yang dilaporkan J. Kremer, bahwa pendidikan di Aceh dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk mengatasi kekerasan, dan upaya telah dilakukan untuk memajukan pendidikan serta melatih generasi muda Aceh agar bisa berperan dalam tugas-tugas pemerintahan di masa depan (Kremer, 1922, pp. 235–236).

Sejak dibukanya sekolah pertama kali pada 1907, maka bermunculan pula sekolah lain, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta di kota besar hingga desa-desa Aceh. Jumlah guru pun naik secara signifikan yang kebanyakan didatangkan dari daerah lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan guru-guru Volksschool terutama dari suku Aceh, maka pada tahun 1920 pemerintah membuka Normaal School (untuk menghasilkan guru pribumi) di Koetaradja dan Langsa, yang kemudian dipindah ke Kualasimpang (Syarwan, 2002, p. 130). Untuk menguatkan solidaritas, sebuah perserikatan guru bernama Perkoempoelan Goeroe-goeroe Groot Atjeh (PGGA) terbentuk pada tahun 1915 sebagai perlindungan tiap anggotanya ("Permohonan P.G.G.A.," 1930). Perserikatan ini memiliki corong aspirasi resmi, *Oetoesan Goeroe*. Surat kabar ini digunakan sebagai wadah para anggota PGGA dalam berbagai informasi

terhadap pendidikan hingga perjuangan terkait kesejahteraan para guru yang berada di Aceh (“Tjatetan, Pengadjaran Dan Pemandangan Sepatah Kata Dari Penulis,” 1928). Dalam kasus di Aceh ini dan berdasarkan data dari konten *Oetoesan Goeroe* dan dari *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*, guru-guru pribumi yang ada dalam wacana direpresentasikan oleh guru-guru yang mayoritas bertugas di dua jenis sekolah dasar (*lagere school*), yaitu 2e Klasse School dan Volksschool.

Oetoesan Goeroe juga menjadi wadah penting dalam menggambarkan hubungan serikat guru dengan pemerintah kolonial maupun masyarakat. Pada awalnya, serikat guru berdiri secara mandiri dalam berbagi nasib setiap anggota. Tetapi sejak 1926, perserikatan ini mengubah nama yang awalnya Perkoempoelan Guru-guru Groot Atjeh menjadi Perkoempoelan Goeroe-goeroe Gouvernement Atjeh (“Pemberi Tahoean!,” 1926). Fakta ini membuktikan bahwa PGGA terafiliasi dengan pemerintah kolonial. Guru-guru sekolah di Aceh sebagian besar memang pegawai pemerintah, meskipun terdapat beberapa guru bantu maupun guru swasta yang berasal dari HIS Muhammadiyah yang kurun 1926-1930 juga berkembang pesat di Aceh. Serikat tersebut juga menjalin hubungan dengan Persatoean Goeroe Hindia Belanda (PGHB) yang berpusat di Batavia, namun bukan afiliasi melainkan sekadar kerjasama. Oleh sebab itu, *Oetoesan Goeroe* hanya berada di bawah kendali PGGA saja (Reid, 1979, p. 20).²

Pemerintah kolonial dikenal sangat ketat memberikan izin dan mengawasi sebuah organisasi ataupun perserikatan orang-orang pribumi terdidik. Eksistensi PGGA sebenarnya sangat bergantung kepada sikap pemerintah kolonial yang juga diuntungkan terutama untuk mengontrol aktivisme intelektual pribumi di Aceh. Sekalipun PGGA mencerminkan benih aktivisme intelektual pribumi, namun keberlangsungannya sangat bergantung kepada pendanaan dan restu pemerintah kolonial. Sampai di sini, posisi PGGA dalam kognisi sosial sangat jelas berada di antara masyarakat Aceh yang umumnya cenderung konservatif namun rentan dan pemerintah kolonial yang sekuler namun *overpower*. Posisi ini sangat mempengaruhi *point of view* konten-konten berita dalam *Oetoesan Goeroe* yang sarat akan problem-problem dilematis.

Berita-berita yang dipublikasikan dalam *Oetoesan Goeroe* sebagian besar berkaitan dengan anggotanya secara langsung. Sebagai contoh, perpindahan guru pada Oktober 1926 yang menjadi anggota PGGA menjadi topik dalam pemberitaan dan beberapa opini yang terkait model pembelajaran untuk sekolah di Aceh (“Kepindahan Teman-Teman,” 1926). Telah disebutkan bahwa tujuan terselubung dari pendirian sekolah di Aceh khususnya adalah meredam perlawanan rakyat Aceh. Oleh sebab itu,

² Aceh Barat, khususnya koloni Minangkabau yang besar di Tapak-tuan, merupakan saluran alami radikalisme agama dari Sumatera Barat ke Aceh, dan pada tahun 1920-an Sumatera Thawalib mulai memiliki dampak besar di daerah tersebut. Namun, setelah pemberontakan 'Bakongan' pada tahun 1926-7, Belanda memberlakukan larangan mutlak terhadap aktivitas agama-politik di Aceh Barat sehingga wilayah ini menjadi yang paling terisolasi dan tradisional dibandingkan wilayah lainnya. Muhammadiyah, penerus pengaruh Sumatera Thawalib yang besar di Sumatera Barat, telah memahami pentingnya menjaga wajah yang sangat non-politik terhadap Belanda. Dibentuk dan dipimpin oleh modernis Muslim perkotaan yang berpendidikan Belanda di Jawa, Muhammadiyah telah membangun jaringan sekolah dan organisasi pendukung yang sangat mengesankan di seluruh Indonesia pada tahun 1930-an. Sejak dibukanya sekolahnya di Kutaraja pada tahun 1928, Muhammadiyah menjadi organisasi nasional yang paling signifikan di Aceh. Muhammadiyah dengan cepat menyebar ke Sigli, Lhokseumawe, dan Langsa, tetapi orientasi perkotaannya dan identifikasinya dengan Minangkabau mencegah ekspansi ke wilayah pedesaan Aceh. Pada tahun 1932, diperkirakan hanya 7 persen dari anggotanya adalah orang Aceh, dan hanya dua orang Aceh yang termasuk dalam kelas awal lima puluh siswa yang mendaftar di sekolahnya di Lhokseumawe (Reid, 1979, p. 20).

salah satu yang menjadi sorotan adalah bahasa pengantarnya. Jika di sekitar Sumatera Timur menggunakan bahasa Melayu, maka di Aceh bahasa pengantarnya adalah Aceh atau bahasa Arab. Tentunya ini membuat anggapan beberapa pihak merasa gelisah, sebab meskipun bahasa Melayu ataupun bahasa Belanda dipakai, mayoritas masyarakat Aceh di pedesaan hanya menyukai bahasa Aceh. Tidak heran jika dalam beberapa nomor di *Oetoesan Goeroe* menyinggung tentang pentingnya penggunaan bahasa Aceh ("Pengadjaran Bahasa Atjeh Di Volksschool," 1926).

Dekade kedua abad ke-20 ditandai dengan perkembangan sektor pendidikan yang signifikan. Melalui berita-berita pada *Oetoesan Goeroe* terkesan bahwa hubungan organisasi PGGA dengan pemerintah terjalin dengan baik. Berbagai harapan dan keinginan untuk memperluas jangkauan pendidikan kerap kali diterima oleh pemerintah. Misalnya pada Februari 1928, pada awalnya PGGA sudah mengajukan permohonan kepada Directeur van Onderwijs en Eeredienst (Direktur Pendidikan dan Peribadatan) untuk membuka sebuah Schakelschool di Koetaradja. Schakelschool adalah sekolah lima tahun sebagai syarat bagi lulusan Volksschool untuk menyambung ke sekolah tingkat menengah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Namun permohonan tersebut belum dikabulkan dan akan dipertimbangkan kembali pada tahun berikutnya. Situasi ini menunjukkan kesabaran anggota PGGA untuk mewujudkan visi mereka membuka jalan bagi rakyat pribumi agar mendapat pendidikan lebih tinggi dari sekadar Volksschool.

"Berhoeboeng dengan permohonan toean-toean akan memboeka seboeah schakelschool di Koeta-Radja pada tahoen ini, saja beritahoen kepada toean-toean Bestuur, bahwa permohonan itoe ta' dapat dikaboelkan karena soedah lebih dahoeloe dipoetoeskan, di mana dalam tahoan 1928 ini schakelschool akan diadakan. Tjita-tjita itoe akan diperhatikan lebih landjoet, sehingga dalam pendirian schakelschool dalam 1929, akan diperingati djoega permohonan Perkoempoelan toean-toean" ("Balasan Rekest P.G.G.A.," 1928).

Selain itu, PGGA telah berupaya mengembangkan organisasinya dengan kemampuan yang apa adanya, seperti belum mampu memasang jaringan telepon sehingga keperluan komunikasi masih harus mengandalkan surat pos. Solusinya adalah membuka cabang-cabang PGGA di beberapa daerah luar Koetaradja untuk melayani guru-guru di pedalaman yang antusias dengan keberadaan PGGA. Misalnya PGGA cabang Blang Pidie yang diberitakan telah didirikan pada 1 Februari 1928.

"Sebagaimana jang telah terbajang pada Oetoesan Goeroe No. 12 memang dalam boelan November 1927 telah beremboes meganja tjabang P.G.G.A. di Belang Pidie, tetap karena colleganja berdjaoehan jang mesti dilajani dengan soerat-soerat jang sebagai Reclame, maka pada tanggal 1 Januari 1928 tetaplah berdirinja tjabang itoe dengan anggotanya baroe 37 orang. Soenggoeh telah berdiri tjabang P.G.G.A. di Belang Pidie tetapi karena tempatnya djaoeh dari kota dan ladennja boleh dikatakan orang doesoen...ialah oentoelek pelamboek dan penambah kesoeboerannja Centraal P.G.G.A." ("Soerat Kiriman," 1928).

Pemerintah juga memfasilitasi pembukaan tersebut dengan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti bangunan sekolah atau guru-guru yang diperlukan. Hanya saja untuk guru bantu (*hulponderwijzer*) terdapat syarat yang harus dilalui dengan mengabdikan selama 5 tahun di desa sebelum diangkat sebagai guru tetap di sekolah pribumi. Sementara itu, pemerintah juga melonggarkan peraturan tersebut khusus untuk guru-guru bantu dari suku Aceh karena memang sangat dibutuhkan kala itu. Namun, umumnya bagi guru-guru bantu dari luar Aceh, peraturan tersebut terasa sangat berat. Bagi PGGA,

peraturan ini sangat dilematis. Satu sisi sangat menguntungkan guru-guru bantu dari suku Aceh, namun di sisi lain menghambat kesejahteraan guru-guru dari luar Aceh. Sampai di sini, cita-cita PGGG untuk melebarkan harapannya terganjal karena aturan pemerintah.

"Menoeroet peratoeran goeroe-goeroe desa jang berachte hulponderwijze sesoedah bekerdja 5 tahoen disekolah desa, boleh diangkat disekolah Inlandsche school. Peratoeran ini beloem ditjahoet, tetapi berhoeboeng dengan keloeran goeroe-goeroe dari Normaal dan Kweekschool, keangkatan goeroe-goeroe Volkschool itoe terdesak. Soenggoehpoen demikian peratoeran itoe, dilonggarkan sedikit bagi goeroe-goeroe bangsa Atjeh jang beracte goeroe bantoe. Mereka jang tjakap, banyak harapan akan dibenoemd lebih lekas dari collega-collega nja jang boekan bangsa Atjeh, sebab tentoe sadja anak negeri itoe lebih baik dididik oleh bangsanja sendiri, soepaja lekas madjoe onderwijsnya" ("Balasan Rekes," 1928).

Benturan antara harapan pendidikan pribumi dengan sikap pemerintah juga terletak dari pendirian sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1928 misalnya, sekolah Muhammadiyah yang telah berdiri masih kesulitan mendapat dukungan ("Moehammadiyah Koeta Raja," 1928; Philips, 1932, p. 30). Tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga masyarakat. Di satu sisi pemerintah menginginkan arah kurikulum yang hanya fokus pada pendidikan duniawi untuk menggantikan sistem lama (*meunasah* atau *mukim*). Muhammadiyah memiliki persyaratan itu, tetapi di sisi lain ilmu agama juga tidak lepas dari arah kurikulumnya, meskipun ilmu agama yang dimaksud lebih ke arah modernitas. Justru di situ juga letak kesulitan Muhammadiyah mendapat dukungan dari masyarakat yang menganggap ilmu agama yang disampaikan terlalu dangkal. Sampai akhirnya pada 1928, Muhammadiyah perlu mendatangkan seorang utusan dari Jogjakarta bernama Soetan Mansjur. Atas mufakat dari Rapat Anggota (*ledenvergadering*) didatangkan seorang guru mengaji dari Jogjakarta yaitu M. Ridhwan Hadjer ("Moehammadiyah Koeta Raja," 1928).

Hubungan antara sekolah swasta yang diwakili Muhammadiyah dengan masyarakat Aceh pada dasarnya kurang berjalan mulus. *Oetoesan Goeroe* mencatat bahwa Muhammadiyah menunjukkan kekhawatiran pada arah pendidikan Aceh yang kurikulumnya fokus pada ilmu umum tanpa ilmu keagamaan ("Verslag Algemeene Openbare Vergadering Moehammadiyah Pada Tanggal 26 Juni 1927 Dalam Panggoeng Deli-Bioscoop Di Koeta-Radja," 1927). Termasuk peran perempuan yang telah diberi kesempatan dalam dunia pendidikan tidak menunjukkan perubahan berarti dan bahkan tidak memberikan kontribusi sama sekali atas harapan dan tujuan pendidikan itu sendiri ("Pendidikan Anak Perempoean Atjeh," 1927). Masyarakat Aceh masih berpikir praktis namun kolot bahwa anak-anak, terlebih perempuan, lebih berguna jika membantu orang tua untuk urusan domestik ("Sekolah Desa Madjoe?," 1927).

Sejatinya pemahaman masyarakat Aceh yang seperti 'abai' terhadap pendidikan akan menguntungkan pemerintah Hindia-Belanda untuk berkuasa secara penuh. Tetapi pada kenyataannya kekuasaan pemerintah hanya *de facto*, sebab perlawanan-perlawanan masyarakat Aceh tetap muncul secara sporadis. Masyarakat Aceh lebih patuh kepada ulama dibandingkan *uleebalang* yang akhirnya memang fokus untuk menghancurkan gerakan yang dipimpin oleh para ulama (Hurgronje, 1906b, p. 110). Salah satu strateginya selain menghancurkan secara militer adalah dengan mengubah *mindset* melalui pendidikan. Maka PGGG cukup berpotensi melaksanakan hal itu.

Termasuk oleh guru-guru dari Muhammadiyah yang juga mengajarkan ilmu umum. Namun, ternyata Muhammadiyah juga tidak meninggalkan ilmu agama yang membuat pemerintah kolonial tidak menyukainya. Masyarakat Aceh sendiri juga tidak begitu menyukai Muhammadiyah karena terlalu fokus pada ilmu umum. Pada akhirnya pendidikan yang diharapkan muncul dari cita-cita pribumi justru kehilangan arah.

Otoesan Goeroe mencatat semua pemikiran-pemikiran dari 1926-1930, bahwa pemahaman masyarakat Aceh tidak bisa lepas dari pemikiran kaum ulama. Pendidikan selalu dikaitkan pada ilmu agama. Hubungan patron-klien tersebut tidak bisa lepas seutuhnya karena sistem pendidikan *meunasah* sudah mendarah daging pada masyarakat Aceh.

Tantangan Membangun Pendidikan

Fokus pendidikan era kolonial terdiri atas: pelajaran bahasa Belanda (membaca dan menulis), berhitung, dan pengetahuan umum (Buchori, 2007). Sistem tersebut dianggap untuk menyetarakan pemahaman orang pribumi dengan orang Eropa dalam alam pikir yang lebih modern. Akan tetapi di sisi lain terdapat anggapan umum bahwa sistem tersebut (yang berasal dari Politik Etis) adalah persiapan untuk mencetak tenaga-tenaga kerja yang lebih cerdas untuk mendukung industri-industri kapitalistik di Hindia Belanda secara lebih murah dan efisien. Oleh sebab itu, pendidikan untuk rakyat pribumi sebenarnya cukup sampai *Volksschool* dan *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* saja tanpa harus naik ke jenjang *Vervolgschool* dan *MULO*, kecuali anak-anak bangsawan Aceh. Pemerintah kolonial mempertimbangkan bahwa tujuan yang sederhana tersebut cukup untuk mengantisipasi *culture shock* (gegar budaya) terhadap pemahaman-pemahaman yang berkembang sejak abad ke-20. Meskipun, pemahaman-pemahaman yang berkembang di dunia tidak bisa diantisipasi untuk mempengaruhi para tokoh-tokoh yang kelak membawa kemerdekaan bagi Indonesia.

Table 3. Levels and models of government schools in Aceh, up to 1939

Level	Model	Years	Available for			Numbers
			Native	European	Foreign Asiatic	
Elementary School (Lagere Onderwijs)	Volksschool	3	✓	✗	✗	438
	Hollandsche Inlandsche School (HIS)	7	✓	✗	✗	8
	Tweede Klasse School	5	✓	✗	✗	30
Transitional school	Vervolgschool	5	✓	✗	✗	45
	Schakel School	3	✓	✗	✗	3
Special School (Speciale School)	Hollandsch Chinese School (HCS)	7	✗	✗	✓	10
	Hollandsch Ambonsche School (HAS)	?	✗	✗	✗	1
	Europeesche Lagere School (ELS)	7	✗	✓	✗	4
Secondary School (Middlebaar Onderwijs)	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)	3-4	✓	✓	✓	1
	Normaal Cursus	1	✓	✗	✗	2
	Meisjes School	2-3	✓	✗	✗	21
Vocational School (Vakonderwijs)	Normaal School	4	✓	✗	✗	2
	Ambacht School	2	✓	✗	✗	1
	Landbouw School	1	✓	✗	✗	3
	Weef School	?	✓	✗	✗	2

Source: Data processed based on A.Ph. van Aken and T. Syarwan (Aken, 1936; Syarwan, 2002).

Sampai di sini kuat dugaan bahwa berbagai hambatan yang dialami PGGA untuk mendorong upaya memperbanyak sekolah-sekolah menengah sebenarnya lebih bermotif politik. Harapan pemerintah kolonial sebenarnya sudah terpenuhi dengan perkembangan sekolah dasar seperti Volksschool dan HIS ketimbang mendukung bertambahnya sekolah yang lebih tinggi yang justru dampaknya akan lebih mengkhawatirkan di kemudian hari. Perlu digarisbawahi sebenarnya sikap pemerintah kolonial dan Departemen Pendidikan sendiri cenderung ambivalen. Terbukti bahwa hingga akhir kekuasaan Belanda, memang tidak pernah ada dibangun sekolah tinggi dari MULO di Aceh. Anak-anak bangsawan Aceh yang telah lulus MULO harus melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi seperti ke Bukittinggi, Batavia, Buitenzorg, Bandung, dan Surabaya.

Namun, pertumbuhan pesat pendidikan di Aceh pada awal abad ke-20 ini tidak muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, pertumbuhan ini terjadi karena tekanan dan paksaan dari pemerintah dan kepala suku setempat (*ulèëbalang*). Inspektur Pendidikan Pribumi A. Vogel, berdasarkan risetnya yang dilakukan pada tahun 1919 di wilayah tersebut menuliskan:

"De indruk, die ondergeteekende op zijn reis door Atjèh heeft opgedaan is, dat de groei van het volksonderwijs geen natuurlijke is, dat hij door dwang is tot stand gekomen en dat het volksonderwijs heden in het echte Atjèhsche gebied nog verre van geliefd is onder de bevolking." (Kreemer, 1923, p. 159).

[Kesan yang saya dapatkan selama perjalanan saya di Aceh adalah bahwa pertumbuhan pendidikan rakyat bukanlah hasil dari keinginan alami masyarakat, tetapi terjadi melalui paksaan, dan pendidikan rakyat saat ini masih jauh dari dicintai oleh penduduk Aceh yang sejati.]

Orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau anak-anak yang tidak rajin bersekolah akan didenda atau dihukum dengan kerja paksa. Meskipun tekanan dari pemerintah Eropa telah berkurang seiring waktu, masih banyak wilayah di Aceh di mana sekolah-sekolah rakyat hanya tetap berjalan karena tekanan dari *ulèëbalang* setempat. Banyak orang tua hanya mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah karena takut akan sanksi dari *ulèëbalang*, bukan karena keinginan mereka sendiri dan memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Situasi ini terutama berlaku untuk sekolah-sekolah perempuan (Kreemer, 1923, pp. 159–160). Dalam konteks ini, pertumbuhan pendidikan rakyat di Aceh tidak bersifat alami atau organik, tetapi lebih merupakan hasil dari tekanan pemerintah kolonial dan ikatan kekuasaan tradisional.

Khusus dalam ruang lingkup Aceh, anak-anak pribumi yang bersekolah di Volksschool diajarkan membaca, menulis aksara Latin dan Arab, dan matematika yang meliputi empat aturan utama dan pecahan sederhana. Bahasa pengantar di semua sekolah hanya bahasa Melayu, yang sebagian besar penduduk tidak mengerti, kecuali di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Hal itu terjadi terutama karena kebanyakan guru-gurunya berasal dari Mandailing dan Minangkabau, serta tidak ada buku pelajaran bahasa Aceh yang tepat (Kreemer, 1923, p. 162).

Tidak maksimalnya sistem pengajaran tampaknya membuat PGGA di dalam *Oetoesan Goeroe* perlu menyisipkan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran. Terlebih lagi surat kabar ini memang diperuntukkan untuk para anggotanya yang

semuanya guru, sehingga diharapkan terdapat kesamaan pola pikir yang eksponensial. Pada nomor-nomor awal *Oetoesan Goeroe* banyak mengulas model pembelajaran yang lebih aplikatif. Misalnya cara menanam dan menyemai benih padi ("Menebarkan Benih Dipersamaian," 1926); teknik mencatat papan tulis ("Djalan Mentjat Papan Toelis," 1926); hingga tuntutan sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ("Hati Moerid Hendaklah Disenangkan," 1926). Tetapi terkadang disisipkan hal yang sifatnya teoretis seperti membahas fenomena antropologis ("Orang Hindia Sebeloem Bertjampoer Dengan Orang Hindoe," 1926). Tujuan dalam berbagi pemahaman tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas, tetapi untuk kelompok guru yang tergabung di dalam PGGA. Termasuk hasil pertemuan-pertemuan PGGA yang kerap dimuat agar anggota yang berada di daerah memahami bagaimana pengembangan sistem belajar-mengajar untuk masyarakat Aceh.

Pada tanggal 7 November 1926 dilaksanakan pertemuan PGGA di sekolah kelas II di Lhoknga. Pertemuan tersebut menghasilkan dua hal, yaitu: mengajarkan huruf Arab di kelas 2 dan mengajar mengarang di kelas 4. Pertemuan ini dihadiri 35 anggota (leden) dan 2 orang tamu sebagai wakil pemerintah, yaitu; Engkoe Menteri Polisi dan Engkoe Adj. Djaksa Lhoknga. Kemudian juga disepakati pertemuan selanjutnya pada hari Minggu, 5 Desember 1926 di sekolah kelas II Inderapoeri ("Vergadering P.G.G.A.," 1926).

Wacana yang paling gencar adalah problem penggunaan bahasa pengantar. Terdapat berbagai benturan dalam penggunaan bahasa. Hal ini menjadi kendala utama untuk sistem belajar-mengajar. Terdapat tiga kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan guru itu sendiri. Telah disebutkan bahwa guru-guru yang ada di Aceh kebanyakan berasal dari luar Aceh (Minangkabau, Mandailing, hingga Jawa). Sebagian besar tergabung ke dalam PGGA dan mereka terbiasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sebab guru-guru tersebut meskipun memahami bahasa Belanda di *Kweekschool* juga terbiasa mengajar menggunakan bahasa Melayu. Sementara masyarakat Aceh enggan beradaptasi dengan bahasa selain bahasa Aceh. Pada waktu yang sama keinginan dan pemahaman masyarakat Aceh yang terbiasa dengan bahasa Aceh tidak didukung dengan buku-buku pelajaran bahasa Aceh. Untuk bahasa Belanda sendiri pemerintah mewajibkannya, baik dalam satu mata pelajaran maupun sebagai bahasa pengantar. Di tengah kemelut penggunaan bahasa tersebut, masyarakat Aceh justru menginginkan penggunaan bahasa Arab sebagai jalannya proses belajar-mengajar. Hal ini menjadi pertentangan yang terus berlarut-larut hingga *Oetoesan Goeroe* dan PGGA bubar.

Meskipun bahasa menjadi kendala utama yang kerap dibahas, nyatanya *Oetoesan Goeroe* masih berusaha menyisipkan berbagai bidang pelajaran lain untuk dipahami oleh anggota PGGA. Di setiap nomor penerbitannya selalu saja dipublikasikan beragam ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh para guru agar disampaikan dalam setiap pembelajaran. Ilmu bumi dan agama hingga sejarah adalah yang paling sering, termasuk dinamikanya sehingga anggota PGGA mendapat orientasi pendidikan yang semestinya. Hal ini tentu saja agar tetap masuk ke dalam harapan para guru dalam mencerdaskan rakyat Aceh.

Dari sisi pemerintah kolonial, penggunaan bahasa juga menjadi persoalan yang berarti. Keinginan bahasa Belanda menjadi bahasa yang umum digunakan terkendala

oleh masyarakat Aceh yang kadung benci unsur-unsur Belanda. Harapan Belanda adalah menyingkirkan bahasa Aceh sebagai bahasa utama pendidikan. Sementara orang Aceh lebih terbiasa dengan bahasa Arab, khususnya sejak *meunasah* yang dianggap mendarah daging selain bahasa Aceh itu sendiri. Terlebih bahasa Aceh adalah satu-satunya bahasa pengantar yang dipahami oleh masyarakat Aceh sehingga sistem pendidikan yang diinginkan Belanda mendapat tantangan yang besar. Hal ini diperparah dengan semakin sulitnya tenaga pengajar yang berkualifikasi bahasa Belanda, sementara jumlah guru juga semakin berkurang karena kesejahteraan yang kurang diperhatikan.

Wacana moral juga gencar dibahas. Contoh khususnya adalah tentang kawin paksa yang umum pada masyarakat Aceh (“Perkawinan Paksa,” 1929); sopan santun antara yang muda kepada yang tua atau sopan santun dalam hal status (“Oemoer Manoesia,” 1929); hingga ajaran agama Islam. Jika ditelisik materi-materi yang dibahas dalam *Oetoesan Goeroe* ini mengedepankan persoalan kehidupan sehari-hari yang terkait pribadi. Sehingga bisa dikatakan pada dasarnya sistem kurikulum yang diharapkan oleh pihak kolonial ‘berhasil’, yakni menjauhkan cara pengajaran yang benci Belanda. Tetapi pada kenyataannya masih belum cukup karena kebencian terhadap Belanda terpatri cukup kuat, khususnya wilayah-wilayah pedalaman. Tentunya terdapat faktor lain mengapa dari segi kurikulum tampak berhasil, tetapi fakta berkata lain. Faktor bahasa adalah faktor dasar yang mempengaruhi minat pendidikan pada masyarakat Aceh secara keseluruhan. Dari data yang dihimpun ditemukan fakta mengejutkan bahwa sekalipun jumlah sekolah dasar di Aceh meningkat secara signifikan (see **Graphic 1**), namun hanya sekitar 5% dari penduduk pribumi di Aceh yang menyelesaikan sekolah dasar milik pemerintah kolonial hingga tahun 1930 (see **Diagram 1**). 90% penduduk dapat diasumsikan lebih memilih tidak bersekolah atau memilih belajar agama Islam kepada ulama dan memilih sekolah swasta yang tidak teridentifikasi datanya. Fakta ini terasa ironis karena proyek pendidikan yang diekspektasikan tinggi malah jauh dari berhasil dan diperkuat oleh fakta bahwa PGGA dan *Oetoesan Goeroe* bubar pada awal 1930-an.

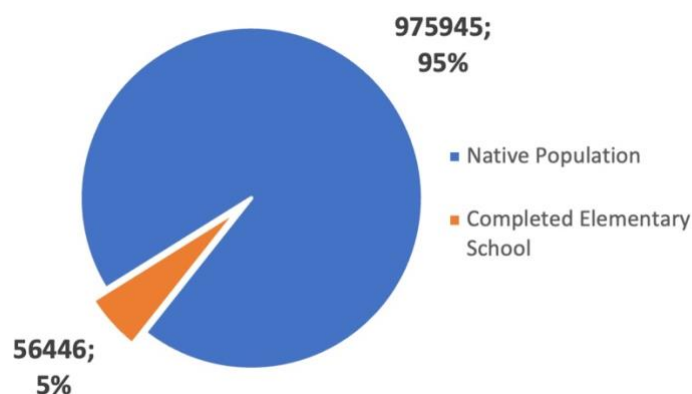


Diagram 1. Percentage of native population by completed elementary school (1930)

Source: Data processed based on Volkstelling 1930 (Departement van Economische Zaken, 1935, pp. 112; 207)

I.J. Brugmans menggambarkan evolusi kebijakan pendidikan di Hindia Belanda selama abad ke-20. Fase pertama ditandai oleh keyakinan luas dalam nilai pendidikan Barat, dengan fokus pada penyebaran pengetahuan Barat di kalangan penduduk pribumi. Namun, sekitar tahun 1915, muncul gejala reaksi dan keraguan tentang manfaat

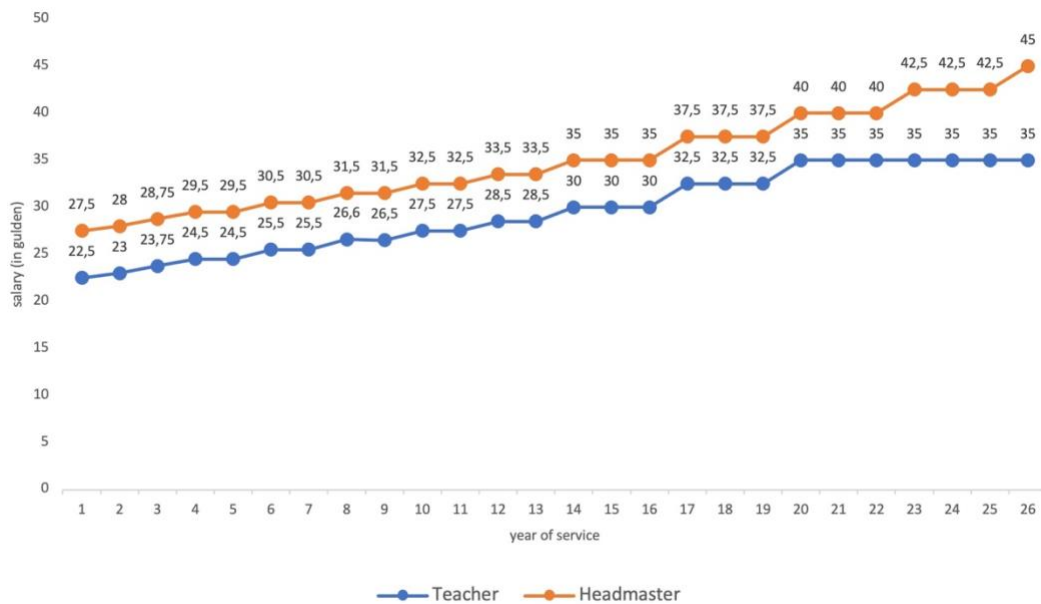
pendidikan Barat, menciptakan fase kedua. Pada fase ini, terjadi pergeseran tentang dampak sosial-ekonomi pendidikan Barat, yaitu munculnya wacana tandingan yang mempertanyakan manfaat pengetahuan Barat dan menyerukan pendidikan yang lebih sesuai dengan lingkungan lokal dan budaya setempat. Ini mencerminkan pertama kalinya ketidakpastian mengenai dampak positif dari pendidikan Barat untuk penduduk pribumi diakui. Fase ketiga ditandai oleh Gubernur Jenderal De Graeff yang membentuk Komisi Pendidikan Belanda-pribumi pada tahun 1927 yang mencerminkan pergeseran fokus dari penyebaran pengetahuan Barat menuju peninjauan kembali dampak sosial-ekonomi dari pendidikan tersebut (Brugmans, 1938, pp. 352–355). Perubahan juga terlihat dalam persepsi masyarakat pribumi terhadap pendidikan. Meskipun elite masih mendukung pendidikan Barat untuk akses ke kekayaan Eropa, ada tanda-tanda perubahan, seperti gerakan Muhammadiyah dan Taman Siswa yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan resmi. Di tengah pertanyaan tentang ‘efisiensi ekonomi’ pendidikan, muncul gerakan oposisi yang mencari alternatif yang sesuai dengan budaya lokal. Meskipun ada kompleksitas dalam evaluasi dampak pendidikan asing, dukungan tetap tinggi di kalangan elite pribumi yang lebih terdidik, dengan sekolah swasta pendidikan Barat yang tidak disubsidi terus berkembang.

Kesejahteraan Anggota PGGA

Tampaknya memang kesejahteraan guru sejak dahulu sampai sekarang adalah masalah mendasar. Pada awal-awal perkembangan pendidikan di Aceh yang menuntut perubahan pendidikan ternyata banyak ditemui kesulitan para guru secara ekonomi dan moral. *Oetoesan Goeroe* merekam semua yang dialami para anggota PGGA. Kesulitan ekonomi berdampak besar pada semua sisi yang diharapkan. Khususnya tentang proses belajar mengajar yang kurang maksimal. Pemerintah kolonial juga dinilai kurang tanggap untuk melihat persoalan ini, sementara di saat yang sama tuntutan pemerintah terhadap keberhasilan program kurikulum justru besar.

Profesi guru dalam kurun waktu PGGA masih berdiri terbagi pada 3 golongan. Guru pemerintah (*Gouvernement onderwijzer*), guru swasta (*particuliere onderwijzer*) dan guru bantu (*hulponderwijzer*). Umumnya, guru pemerintah dan guru bantu dari kalangan pribumi bertugas di 2e Klasse School dan Volksschool, sementara guru swasta tentunya bertugas di sekolah partikelir. Guru pemerintah adalah pegawai negeri dari kalangan Belanda dan pribumi yang bertugas di Volksschool dan HIS gaji yang lebih tinggi. Menurut Mochtar Buchori, gaji guru pemerintah dari kalangan Belanda adalah 75 gulden per bulan, sementara gaji guru pemerintah hanya 40 gulden per bulan (Buchori, 2007). Gaji guru swasta bervariasi, tergantung kemampuan finansial sekolahnya. Misalnya gaji guru HIS Muhammadiyah bisa mencapai 35-45 gulden per bulan. Sementara gaji guru bantu di Aceh yang tercatat di *Oetoesan Goeroe* kurang dari 25 gulden per bulan (“Notulen Alg. Leden Vergadering P.G.G.A. Pada 6 Januari 1929 Bertempat Pada Inlandsch School Koetaradja I, Moelai Poekoel 9.45.,” 1929). Gaji tersebut dikenakan kewajiban iuran sebesar 0,02 – 0,04 gulden untuk organisasi PGGA (“Seroean Dari Satoe Desa,” 1929). Di sisi lain, gaji guru-guru dan kepala sekolah pribumi yang bertugas di Volksschool ternyata cukup rendah, walaupun dapat meningkat sedikit sesuai dengan masa dinas yang lama (see **Graphic 1**). Secara umum, gaji guru-guru pribumi kala itu dirasakan sangat minim bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Graphic 2. Salary of native teacher and headmaster in Volksschool



Source: Data processed based on ("Gadji Goeroe Desa," 1926)

Mirisnya, jika melihat pada awal-awal pembukaan pendidikan di Aceh, kelihatan bahwa sebenarnya pemerintah membutuhkan banyak guru pribumi. Memang pada akhirnya banyak guru pribumi didatangkan dari luar Aceh. Sayangnya, kebutuhan tersebut sulit terpenuhi sehingga sekolah-sekolah terpaksa merekrut guru bantu dengan gaji yang tidak pasti. Tetapi, gaji yang diterima kurang sepadan dengan pekerjaannya sehingga terpaksa untuk memenuhinya dengan mencari tambahan pendapatan di luar. Hal ini mengganggu proses belajar mengajar itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, redaksi di *Oetoesan Goeroe* mempublikasikan berbagai solusi alternatif kepada pembacanya tutorial yang rinci dan jelas untuk beternak ayam atau memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran. Fenomena ini membuktikan sulitnya mendapatkan perhatian dan kesejahteraan dari pemerintah bagi para anggota PGGA.

"...tetapi, beberapa kebijakan pemerintah sudah mulai memperbaiki nasib para guru dengan peningkatan gaji. Untuk para guru yang masih memiliki gaji rendah, ada alternatif pekerjaan yaitu dengan beternak ayam atau menanam sayuran. Informasi tambahan mengenai cara melakukan pekerjaan tersebut sekaligus cara mengobati ayam yang sakit" ("Batja Sadjalah," 1929).

Tentunya tidak hanya sekadar solusi menambah pendapatan, PGGA juga aktif memperhatikan kesejahteraan guru dengan melobi atau membuat permohonan kepada pemerintah untuk meningkatkan gaji para guru. Tidak hanya untuk guru bantu, melainkan juga guru-guru pemerintah yang di masa itu secara umum juga masih belum sejahtera.

Dinamika kesejahteraan para guru tidak hanya bergantung pada faktor gaji, melainkan juga faktor moralitas. Pada dasarnya kebanyakan guru pribumi yang bertugas di Aceh adalah anggota PGGA yang berasal dari luar daerah Aceh. Tidak sedikit guru-guru tersebut urang fokus dalam bekerja karena selalu ingat dengan kampung halaman. Guru yang sudah memiliki keluarga terpaksa harus membawa keluarganya ke Aceh dan harus menerima kenyataan yang sulit. Tidak heran juga pada beberapa nomor di *Oetoesan*

Goeroe sering mempublikasikan surat pembaca yang berisi keluhan-keluhan anggota PGGA. Salah satu contohnya adalah seorang guru yang dianggap kurang cakap oleh *Controleur* dipindahkan dari Volksschool Glee Baroe ke Volksschool Eumpee Ara, namun guru tersebut memohon untuk tidak dipindahkan karena istrinya yang sedang hamil. Pada akhirnya guru tersebut statusnya diturunkan menjadi guru bantu (“Nasib Seoerang Goeroe Desa Di Atjeh,” 1929).

Faktanya, pemerintah kolonial menuntut profesionalisme seorang guru, tetapi tidak mengimbangnya dengan peningkatan kesejahteraan guru-guru tersebut. Suara-suara para guru sulit menjangkau pintu empati pemerintah kolonial. Bahkan, sering kali pemerintah kolonial ‘menuntut’ seorang guru untuk lebih totalitas mengajar dengan menekuni bahasa Belanda dan mengajarkan dengan bahasa Belanda dengan iming-iming adanya peningkatan gaji bagi guru yang bisa berbahasa Belanda. Namun kenyataannya hanya menjadi wacana di *Oetoesan Goeroe* hingga PGGA sendiri turun tangan untuk membantu para anggotanya yang kekurangan. Sampai di sini, terbukti bahwa pemerintah kolonial memberi misi yang mulia kepada guru-guru pribumi namun dengan upah yang tidak begitu berbeda dengan buruh di perkebunan maupun pabrik. Tampaknya, ketidakmampuan pemerintah kolonial mengalokasikan dana yang proporsional untuk sektor pendidikan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan finansial pemerintah akibat pengeluaran biaya kampanye militer puluhan tahun yang begitu besar.

Di sisi lain, meskipun kesulitan ekonomi melanda sebagian besar anggota PGGA, kerap kali berita di *Oetoesan Goeroe* mendukung secara moral. Dalam beberapa nomor di *Oetoesan Goeroe* setiap pembicaraan nasib guru selalu diiringi dengan kemuliaan profesi tersebut. Terkait dengan agama yang menjelaskan bahwa guru dapat membawa pribadinya ke kemuliaan di akhirat dari amal baik yang didapatkan. Setidaknya hal itu bisa menjadi pelipur lara dan penyemangat di tengah pendapatan ekonomi yang tidak menentu, meskipun tidak bisa dikatakan berhasil. Tetapi dari sekian guru yang bertahan bukan semata-mata persoalan amal baik yang didapat, melainkan sebagian tidak tahu lagi bagaimana menekuni profesi lain selain menjadi guru (“Mimpi,” 1929).

Selain membahas guru-guru aktif, PGGA juga memperhatikan guru-guru yang telah pensiun. *Oetoesan Goeroe* mengabarkan salinan surat pimpinan redaksi, Soetan Pamenan kepada Gubernur Aceh O. M. Goedhart yang mengingatkan bahwa ia dan Mas Soewardi pernah menghadap untuk membahas gaji pensiun, peningkatan gaji di desa, pengembalian anugerah atau penghargaan, juga tentang peraturan pemindahan para guru yang masih berlaku atau sudah dicabut (“Menghadap Jang Moelia Toean Besar Gobnor Atjeh Dan Daerah Ta’loeknya,” 1929). Usaha ini adalah bentuk perhatian PGGA juga untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru-guru. Selama ini untuk gaji guru pribumi yang masih aktif saja masih belum mencukupi, terlebih lagi jika guru tersebut memasuki masa pensiun. Kesulitan demi kesulitan serta merta akan menyertai mereka sehingga pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut. Khususnya yang berada di desa-desa yang sulit terjangkau pemerintah. Selain itu, usaha itu juga menyinggung perpindahan guru yang dirasa kurang tepat hanya karena penilaian kompetensi seorang guru. Masalahnya terletak pada jumlah guru yang sampai 1930-an masih dirasa kurang. Terlebih dengan tuntutan profesi yang memaksa guru untuk profesional tanpa memperhatikan kesejahteraan yang berarti.

Dampak dari kekurangan guru tersebut adalah matinya beberapa sekolah yang diawali kekurangan guru, lalu murid berkurang hingga kurangnya sarana dan prasarana suatu sekolah yang tergambar pada nomor berita di *Oetoesan Goeroe* tahun 1930 ("Pengadjaran Dan Pendidikan," 1930; "Permohonan P.G.G.A.," 1930). Dalam beberapa kesempatan muncul sosok penolong yang membantu tetap menghidupi sekolah tersebut sehingga sang penolong mendapat gelar Pangeran Batara Guru Gorga Pinayungan ("Dja Pangeran Batara Guru Gorga Pinayungan," 1930). Tetapi hal ini tidak selalu hadir sehingga banyak sekolah yang tetap tutup karena banyak faktor seperti kekurangan guru, kekurangan murid, dan kekurangan perhatian dari pemerintah. Tidak heran juga jika sebenarnya proyeksi pemerintah kolonial sebenarnya tidak sepenuhnya sukses.

Sekalipun banyak program pengembangan pendidikan yang gagal dari program pemerintah, nyatanya optimisme guru yang tergabung ke dalam PGGGA terus tinggi. Contohnya dalam *Oetoesan Goeroe* edisi No. 4 Tahun 1929 redaksi mengajak guru-guru Gouvernement Atjeh untuk terus bersatu. Dalam edisi tersebut disebutkan bahwa meskipun PGGGA baru berumur empat tahun, serikat tersebut sudah cukup mumpuni. Untuk itu mereka berharap para guru yang tergabung di PGGGA untuk terus bersatu dan bergotong royong dalam memperbaiki nasib, baik untuk diri sendiri maupun bangsa pribumi ("Goeroe-Goeroe Gouvernement Atjeh, Bersatoelah Kedalam Badan P.G.G.A.!!!," 1929). Cita-cita dan kemuliaan hati para guru kala itu terkubur oleh kenyataan politik yang membuat mereka terlihat sangat lemah dan naif.

KESIMPULAN

Wacana PGGGA yang tergambar dalam *Oetoesan Goeroe* memiliki banyak dinamika dalam tujuan dan harapan membangun pendidikan di Aceh. Sistem kurikulum yang diperkenalkan pemerintah kolonial kurang tepat untuk masyarakat Aceh yang terbiasa dengan pelajaran agama. Porsi pembelajaran antara agama dengan ilmu umum menjadi wacana hangat untuk dibahas oleh berbagai tokoh pendidikan, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan guru-guru pribumi. Di sisi lain, *Oetoesan Goeroe* menjadi wadah utama dalam menyuarakan nasib buruk dan kesejahteraan guru yang tergabung dalam PGGGA. Situasi ini mempengaruhi moralitas pendidik dan berdampak secara tidak langsung kepada peserta didik. Maka pada akhirnya harapan guru dalam membangun pendidikan di Aceh sekitar dekade kedua abad ke-20 menemui hambatan yang terlalu banyak. Meskipun memikul misi yang sangat mulia, namun tidak dapat dipungkiri sebuah fakta bahwa PGGGA merupakan salah satu dari banyak instrumen pemerintah kolonial untuk mewujudkan Pasifikasi Aceh dalam bidang pendidikan untuk rakyat pribumi. Namun kenyataannya justru miris dan mencerminkan hubungan patron-klien yang tidak harmonis. Pemerintah kolonial bercita-cita mengembangkan sekolah-sekolah dasar untuk rakyat pribumi di pedesaan agar 'teradabkan' secara Barat, paranoid terhadap eksistensi ulama dan pendidikan Quranik, dan sangat mengharapkan guru pribumi untuk membantunya namun tidak begitu peduli dengan aspirasi yang disuarakan oleh PGGGA. Di sisi lain, guru-guru pribumi yang direkrut kebanyakan dari luar Aceh. Mereka juga kesulitan beradaptasi dengan selera dan gaya belajar penduduk di desa-desa, gaji yang sangat rendah, fasilitas pendukung yang tidak sesuai ekspektasi, dan sulitnya menyampaikan aspirasi. Namun, mereka telah membuktikan loyalitas dan

integritasnya untuk tetap bertugas dalam serta keterbatasan. Harus diakui pula bahwa secara umum tingkat kepercayaan penduduk Aceh terhadap institusi pendidikan formal tergolong rendah pada masa itu. Walaupun secara statistik jumlah sekolah dasar selama paruh pertama abad ke-20 meningkat signifikan, namun berbanding terbalik dengan fakta bahwa hanya 5% dari penduduk Aceh yang lulus sekolah dasar. Eksistensi PGGA yang bergantung pada pemerintah kolonial tidak pernah menemukan peluang dan jalan sebagaimana yang dicita-citakan sejak awal berdirinya hingga kandas bersama *Oetoesan Goeroe* pada tahun 1930.

Interpretasi yang telah dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Van Dijk terbukti berhasil membantu mempertajam hasil analisis dan sintesis pada analisis tingkat makro terhadap teks dalam *Oetoesan Goeroe*. Hasil tersebut menambah bobot analisis sejarah yang lebih objektif, karena meminjam pendekatan Historiographical CDA dari Mariana Achugar dan diikuti dengan hasil analisis terhadap dimensi kognisi sosial dan konteks kesejarahan Hindia Belanda pada periode paruh pertama abad ke-20, khususnya di sektor pendidikan. Keterbatasan riset ini terletak pada objek riset, yaitu surat kabar *Oetoesan Goeroe* yang kebanyakan menyumbang data terkait guru-guru pribumi sekolah dasar dalam PGGA, dan PGGA itu sendiri sebagai subjeknya. Sebagai celah bagi riset mendatang, peneliti setelah ini dapat memperluas objek kajian dari surat kabar atau sumber lainnya dan memperluas subjek kajian terkait guru sekolah pada tingkat dan jenis yang lebih beragam.

Referensi

- Achugar, M. (2017). Critical discourse analysis and history. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315739342>
- Adaby, I. (2017). Identitas Aceh dan Indonesia: Melihat Aceh dan Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 8(2), 124–135. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/71>
- Ahmad, Z. (Ed.). (1984). *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Aken, A. Ph. van. (1936). *Memorie van Overgave van het Gouvernement Atjeh*. Ministerie van Koloniën. 2.10.39 Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963) (<https://www.nationaalarchief.nl/>). Retrieved from https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/160/file/NL-HaNA_2.10.39_160_0001
- Alfian, I. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aneka Warta. (1930, September 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 10. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Anis, M. (2015). Peran PUSA terhadap Lembaga Pendidikan Madrasah di Aceh Awal Abad XX. *SEUNEUBOK LADA*, 2(1), 53–69. Retrieved from <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jsnbl/article/view/557>
- Ardhillah, F. (2022). *Sejarah Pendidikan Sekolah Rakyat (Volkschool) pada Masa Kolonial Belanda di Aceh* (Undergraduate Thesis). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Balasan rekes. (1928, March 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 3. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas

- as.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%203-4%20Maart%20Apr%2015_001.pdf
- Balasan rekest P.G.G.A. (1928, February 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Basri, B. (2022). Eksistensi Dayah di Aceh Masa Kolonialisme sampai Orde Baru (1900-1998). *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 61–76. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1086>
- Batja sadjarah. (1929, March 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 6–7. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Brugmans, I. J. (1938). *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*. Groningen: J.B. Wolters.
- Buchori, M. (2007). *Evolusi Pendidikan di Indonesia: Dari Kweekschool Sampai ke IKIP, 1852-1998*. Yogyakarta: Insist Press.
- Departement van Economische Zaken. (1935). *Volkstelling 1930, IV: Inheemsche Bevolking van Sumatra*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Departement van Onderwijs en Eeredienst. (1911). *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over het jaar 1910*. Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst.
- Departement van Onderwijs en Eeredienst. (1915). *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over het jaar 1912*. Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst.
- Departement van Onderwijs en Eeredienst. (1916). *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over het jaar 1914*. Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst.
- Departement van Onderwijs en Eeredienst. (1920). *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over het jaar 1918*. Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst.
- Departement van Onderwijs en Eeredienst. (1921). *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over het jaar 1919*. Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst.
- Dja Pangeran Batara Guru Gorga Pinayungan. (1930, January 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 9. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Djalan mentjat papan toelis. (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 5. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Fatianda, S., & Badrun, B. (2022). Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Reformasi Pendidikan Islam di Aceh, 1939-1952. *Local History & Heritage*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.323>
- Gadji goeroe desa. (1926, March 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Goedhart, O. M. (1929). *Memorie van Overgave van het Gouvernement Atjeh*. Ministerie van Koloniën. 2.10.39 Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963) (<https://www.nationaalarchief.nl/>). Retrieved from

- https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/158/file/NL-HaNA_2.10.39_158_0163
- Goeroe-Goeroe Gouvernement Atjeh, Bersatoelah kedalam Badan P.G.G.A.!!! (1929, April 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 4–5. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Graf, A., Schröter, S., & Wieringa, E. (2020). *Aceh: History, Politics and Culture*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gunawan, R. P. T., & Suhaeni, E. (2022). Jejak Langkah Pendidikan Masa Kolonial dari Muka Volkschool. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 599–609. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4394>
- Hadi, A. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 179–194. Retrieved from <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/48>
- Hasballah, M. (2020). Meunasah: Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh. *At-Tafkir*, 13(2), 173–186. <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1848>
- Hati moerid hendaklah disenangkan. (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 7. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Hurgronje, C. S. (1906a). *The Achehnese* (Vol. 1). Leiden: E.J. Brill.
- Hurgronje, C. S. (1906b). *The Achehnese* (Vol. 2). Leiden: E.J. Brill.
- Ibrahim, M. (Ed.). (1991). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Inayatillah, I. (2023). Tradition of Islamic Basic Education in Aceh. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 6(4), 671–683. <https://doi.org/10.29062/edu.v6i4.681>
- Ismail, B. (1995). *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira'.
- Ismail, M. G. (1991). *Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942* (Doctoral Dissertation). Universiteit Leiden, Leiden.
- Jongejans, J. (1939). *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu*. Den Haag: NV. Baarn.
- Kepindahan Teman-Teman. (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 1. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Kreemer, J. (1922). *Atjeh: Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden* (Vol. 1). Leiden: E.J. Brill.
- Kreemer, J. (1923). *Atjeh: Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden* (Vol. 2). Leiden: E.J. Brill.
- Mahmazar, M., Mulyadi, & Miswari. (2023). Eksistensi, Regulasi, dan Fungsi Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6081>
- Menebarkan benih dipersamaian. (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Menghadap jang moelia Toean Besar Gobnor Atjeh dan daerah ta'loeknya. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 1–2. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf

- Mimpi. (1929, March 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 3–4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Moehammadiyah Koeta Raja. (1928, February 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 3. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515>
- Nasib seorang goeroe desa di Atjeh. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 7. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Notulen. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 2. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Notulen Alg. Leden vergadering P.G.G.A. pada 6 Januari 1929 bertempat pada Inlandsch School Koetaradja I, moelai poekoel 9.45. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 2–4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Nurainiah. (2021). Sistem Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh. *Serambi Tarbawi*, 9(1), 75–92. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v9i1.5054>
- Oemoer Manoesia. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 6. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Orang Hindia Sebeloem Bertjampoer dengan Orang Hindoe. (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 6. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Pemberi Tahoean! (1926, October 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 1. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%204%20Oct%2015_001.pdf
- Pendidikan anak perempoean Atjeh. (1927, July 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 2–3. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%206%20Des%2015_001.pdf
- Pengadjaran Bahasa Atjeh di Volksschool. (1926, December 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 3–4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%206%20Des%2015_001.pdf
- Pengadjaran dan Pendidikan. (1930, July 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 4. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf

- Perkawinan Paksa. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 6. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Permohonan P.G.G.A. (1930, January 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 2–3. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Philips, A. H. (1932). *Memorie van Overgave van het Gouvernement Atjeh*. Ministerie van Koloniën. 2.10.39 Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963) (<https://www.nationaalarchief.nl/>). Retrieved from https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/159/file/NL-HaNA_2.10.39_159_0119
- Raya, Moch. K. F. (2021). Dayah and Meunasah in Aceh: Reform in Local Context. *Jurnal Tatsqif*, 19(1), 21–40. <https://doi.org/10.20414/jtq.v19i1.3504>
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Roche, S. (2012). Dayah, the Traditional Islamic Education System of Aceh 1900-2000. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 239. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1879>
- Sekolah desa madjoe? (1927, July 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 1–2. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%206%20Des%2015_001.pdf
- Seroean dari satoe desa. (1929, January 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 5–6. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Soerat Kiriman. (1928, February 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 7. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Suwignyo, A. (2012). *The Breach in the Dike: Regime change and the standardization of public primary-school teacher training in Indonesia (1893-1969)* (Doctoral Dissertation, Leiden University). Leiden University. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1887/18911>
- Swart, H. N. A. (1918). *Memorie van Overgave van het Gouvernement Atjeh*. Ministerie van Koloniën. 2.10.39 Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963) (<https://www.nationaalarchief.nl/>). Retrieved from https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/157/file/NL-HaNA_2.10.39_157_0001
- Syarwan, T. (2002). *Pendidikan Barat untuk Penduduk Bumiputera di Aceh, 1900-1942* (Master Thesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tjatetan, Pengadjaran dan Pemandangan Sepatah kata dari Penulis. (1928, February 15). *Oetoesan Goeroe*, pp. 7–9. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf
- Van Dijk, T. A. (Ed.). (2011). *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446289068>
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (1st ed., pp. 466–485). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22>
- Van Dijk, T. A. (2016). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Studies* (Third Edition, pp. 62–86). SAGE

Publications Ltd. Retrieved from <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/methods-of-critical-discourse-studies/book242185#preview>

Vergadering P.G.G.A. (1926, November 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 1. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201928%20No%202%20Feb%2015_001.pdf

Verslag Algemeene Openbare Vergadering Moehammadijah pada tanggal 26 Juni 1927 dalam panggoeng Deli-Bioscoop di Koeta-Radja. (1927, July 15). *Oetoesan Goeroe*, p. 2. Retrieved from https://khastara.perpusnas.go.id/landing/flip/300332?opac_url=https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Oetoesan%20Goeroe%201926%20No%206%20Des%2015_001.pdf